



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Uji Formil Revisi Kedua UU PPP

**Jakarta, 5 September 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Sidang ini akan digelar pada Senin (5/9), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H sebagai Pemohon I yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara FH UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Laurensius Arliman, S.H., M.H sebagai Pemohon II yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ekasakti, Bayu Satria Utomo sebagai Pemohon III yang merupakan mahasiswa, selanjutnya terdapat Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai Pemohon III dan Pemohon IV. Para Pemohon mengajukan uji formil UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Para Pemohon menjelaskan bahwa revisi kedua UU PPP tidak memenuhi syarat sebagai RUU kumulatif terbuka, proses pembahasan yang tidak memperhatikan partisipasi, dilakukan secara tergesa-gesa dan pelanggaran terhadap asas kejelasan tujuan. Sedangkan dalam UU PPP, tahapan pembentukan undang-undang terbagi atas lima tahapan, yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Dalam proses revisi kedua UU PPP ini, terdapat tiga tahapan yang tidak dijalankan sesuai prosedur yakni tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.

Bahwa dilakukannya revisi kedua UU PPP dengan dalil menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidaklah tepat. Mengingat Putusan MK tersebut sama sekali tidak menyatakan bahwa UU PPP bertentangan dengan UUD 1945. Seharusnya, yang perlu ditinadalah meladalkanjuti oleh Pemerintah dan DPR adalah melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurut para Pemohon dengan adanya revisi kedua UU PPP hanyalah bentuk legitimasi keberadaan UU Ciptaker dan praktik-praktik gelap yang membantu lahirnya UU Ciptaker.

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945. **(ASF)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)